

Mengurus Homo Indonesiaensis

Abdul Malik Gisnar

Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia
abdul.malik@gmail.com

ABSTRAK

Diskusi-diskusi mengenai Indonesia, Negara Indonesia, NKRI, kebangsaan Indonesia, dan sebagainya sering lupa bahwa Indonesia bukanlah sekedar fakta geografis, demografis, politis, ataupun yuridis saja. Indonesia adalah sebuah proyek kultural psikologis besar. Oleh karena itu, untuk mengurus Indonesia diperlukan juga strategi kultural psikologis yang komprehensif, bukan sekedar jargon dan seremoni saja. Pada gilirannya, mencari strategi budaya yang pas bagi Indonesia hari ini menuntut kita untuk memahami Indonesia sebagai suatu modern post-colonial state. Identitas dan dinamika kebangsaan hari ini merupakan fungsi dari warisan kolonial sebelum kemerdekaan dan apa yang terjadi setelahnya. Dengan demikian, pertama-tama yang perlu untuk dilihat adalah Indonesia sebagai suatu "projek" psikologis besar dan faktor-faktor yang terlibat di dalamnya; kedua, kondisi Indonesia/manusia Indonesia hari ini; dan yang ketiga, atas dasar kedua hal di atas, bagaimana kita membangun fondasi bagi strategi kebudayaan yang pas.

Kata Kunci: Psikologis, Post-colonial, Kebudayaan

ABSTRACT

Discussions about Indonesia, the Indonesian State, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), Indonesian nationality, and so on often forget that Indonesia is not merely a geographical, demographic, political, or legal fact. Indonesia is a major psychological cultural project. Therefore, managing Indonesia requires a comprehensive psychological cultural strategy, not just jargon and ceremonies. In turn, finding a cultural strategy that suits Indonesia today requires us to understand Indonesia as a modern post-colonial state. Today's national identity and dynamics are a function of the colonial legacy before independence and what has occurred since. Therefore, it is necessary to first examine Indonesia as a major psychological "project" and the factors involved in it; second, the condition of Indonesia/Indonesian people today; and third, based on these two points, how we can build the foundation for an appropriate cultural strategy.

Keywords: Psychological, Post-colonial, Cultural

PENDAHULUAN

Negara Indonesia lahir di penghujung era kolonialisme, didorong oleh arus deras gerakan nasionalisme yang merupakan semangat zaman bangsa-bangsa terjajah ketika itu. Pada umumnya, gerakan nasionalisme abad 20 juga merupakan perjuangan mengatasi dan mengurus partikularisme lokal. Keberhasilan negara-negara bekas jajahan antara lain tergantung pada apakah ia dapat mengatasi dan mengurus partikularisme lokal ini.

Dalam kasus Indonesia, selain merupakan proyek politik yang rumit, upaya mengatasi dan mengurus partikularisme lokal ini juga merupakan suatu proyek psikologis dan kultural yang luar biasa besar. Hendak dicoba dalam *mega project* ini untuk menciptakan perasaan dalam diri populasi yang begitu besar dan beraneka ragam, yang tersebar ribuan kilometer dari Sabang sampai Merauke, bahwa mereka merupakan bagian dari suatu entitas abstrak bernama Indonesia yang sebelumnya tidak pernah ada dan begitu jauh dari pengalaman hidup sehari-hari.

Pada tataran psikologis, eksperimen ini pada hakekatnya meminta, sebagai misal, seorang petani di suatu sudut desa di Aceh untuk membayangkan bahwa mereka terikat dalam satu kebersamaan, bahkan persaudaraan (sebagai saudara sebangsa dan setanah air), dengan seorang nelayan di Papua, yang terpisah jarak ribuan kilometer, berbeda bahasa dan agama, serta tak pernah bertemu satu dengan yang lain. Indonesia dalam hal ini adalah sebaik-baik contoh dari, meminjam istilahnya Ben Anderson, *the imagined community* (Anderson, 1991).

Eksperimen psikologis dan budaya di atas semakin rumit pula dengan warisan sejarah kolonialisme. Penjajahan Belanda mewariskan dua kompleks psikologis yang bertolak belakang namun berpilin sangat erat menentukan keberhasilan upaya pembangunan kebangsaan dan identitas nasional; yang pertama adalah solidaritas yang muncul dari pengalaman kolektif yang buruk dari mayoritas populasi ketika berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial, dan yang kedua adalah semangat yang rendah, identitas kolektif yang negatif, dan perasaan minder sebagai akibat dari penjajahan yang begitu lama (Soekarno, 1930).

Kompleks psikologis pertama adalah modal awal yang perlu tersedia untuk membangkitkan apa yang oleh Ernst Renan disebut sebagai solidaritas agung (*the grand solidarity*) yang menyatukan penduduk dengan latar belakang yang demikian beraneka ragam (Renan, 1882). Dalam artikel pendeknya *What is a nation?*, Renan mengatakan kebangsaan harus dipahami sebagai suatu bentuk solidaritas moral yang dipupuk dan dipertahankan melalui kesadaran sejarah yang khas. Tanpa kehendak dari warganya untuk melanjutkan kehidupan bersama, suatu bangsa akan mengalami disintegrasi dan tenggelam ditelan sejarah. Kehendak sadar hari ini merupakan titik temu dari *evaluasi pengalaman kehidupan berbangsa di masa lalu dengan antisipasi atau proyeksi kehidupan berbangsa di masa depan*. Masa lalu dan masa depan ini bertemu dalam prestasi-prestasi atau situasi kebangsaan hari ini.

Sebaliknya, kompleks psikologis yang kedua, sering disebut sebagai "mentalitas bangsa terjajah," (*colonized mentality*) merupakan suatu rintangan besar yang harus diatasi. Bila kebangsaan yang dibangun diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, serta kebanggaan bagi individu warga negara, dan dengan demikian menjadi wadah psikologis bagi keragaman Indonesia yang luar biasa besar, maka identitas kebangsaan inipun harus memiliki gambaran yang secara umum positif.

Latar belakang psikologis dan kultural yang rumit di atas perlu dipahami dan dipertimbangkan benar untuk membangun politik budaya yang pas sehingga identitas nasional yang kuat dapat tercipta. Para ibu dan bapak pendiri bangsa Indonesia sadar betul akan persyaratan di atas. Karena itu, Bung Karno, misalnya, menyatakan bahwa "kemerdekaan" adalah "jembatan emas, di seberangnya akan diwujudkan masyarakat adil dan makmur". Lebih lanjut, di depan pengadilan penjajah terhadap dirinya pada tahun 1930, ia mengatakan bahwa perjuangan partainya adalah untuk "membangkitkan dan menghidupkan keinsafan rakyat akan ia punya 'masa silam yang indah', 'masa (kini) yang gelap gulita', dan janji-janji suatu masa depan yang melambai-lambai, berseri-seri'.

Jelas bahwa pada awalnya kebangsaan Indonesia juga dimengerti sebagai solidaritas agung. Logika pendiriannya adalah bahwa pemerintahan oleh orang asing hanya menimbulkan kesengsaraan dan harus dihentikan. Satu-satunya jalan untuk mencapai hal ini adalah bila kelompok-kelompok yang terjajah *bersatu* membangun solidaritas untuk melawan politik memecah belah. Wadah politik bagi persatuan ini adalah "negara Indonesia," sedang wadah sosio-psikologisnya adalah "kebangsaan Indonesia" yang diharapkan menjadi identitas yang transenden sekaligus komplementer terhadap

identitas-identitas primordial yang ada seperti suku, agama, bahasa, dan wilayah. Kedua wadah ini tentunya saling terkait dan tak bisa dipisahkan.

Kebangsaan Indonesia bisa dimengerti sebagai identitas nasional, identitas baru manusia Indonesia yang komplementer terhadap identitas-identitas “lokal” yang secara askriptif dimiliki (*ascriptive identities*), seperti etnisitas, ras, dan agama. Kedua identitas ini memiliki prinsip penggalangan solidaritas yang berbeda. Konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik dari sosiolog Emile Durkheim dapat kita pinjam secara longgar untuk memahami kedua macam identitas ini. Identitas nasional (dan budaya nasional pada umumnya) adalah salah satu bentuk solidaritas organik, yaitu solidaritas yang terbangun dari rasa saling ketergantungan). Sedangkan identitas lokal (dan budaya lokal pada umumnya) merupakan satu bentuk solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang terbangun dari rasa persamaan. Jadi, pada tataran nasional kita dapat memiliki suatu kesadaran kolektif yang basis utamanya adalah saling ketergantungan dalam suatu entitas politik yang bernama negara untuk mencapai cita-cita masing-masing (kemerdekaan, kesejahteraan, dan mimpi-mimpi apapun lainnya). Sementara itu, pada tataran lokal kita memiliki kesadaran kolektif yang basis utamanya adalah homogenitas dan identifikasi yang tercermin dalam persamaan tempat asal, agama, bahasa, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Kata “utamanya” dalam batasan ini dimaksudkan untuk tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kedua tataran (nasional dan lokal) kedua bentuk solidaritas ini ada.

Dengan pemahaman mengenai identitas kebangsaan seperti di atas, modal utama para pendiri bangsa dalam membangun kebangsaan Indonesia sesungguhnya adalah cita-cita masa depan. Kita tahu bahwa masa silam yang mereka rujuk, misalnya zaman keemasan Melayu, Sriwijaya, Mataram, Majapahit, Pajajaran, bisa dengan mudah diartikan sebagai masa silam kelompok atau etnik tertentu. Dalam konteks inilah sebenarnya Indonesia adalah suatu Republik Masa Depan; suatu bangsa yang perekat persatuannya terutama adalah masa depan yang kita bayangkan bersama, bukan persamaan asal di masa lalu dan masa kini yang nyata-nyata memang beraneka ragam. Negeri imigran seperti Amerika dengan the *American Dream*-nya adalah salah satu contoh fenomena kebangsaan semacam ini (Alexis, 2003).

Solidaritas antargolongan pada masa prakemerdekaan yang dicanangkan secara formal dalam Sumpah Pemuda dan secara longgar menjadi parameter yang baik bagi dinamika hubungan antarkelompok saat berhadapan dengan penjajah, kini harus diformulasikan ke dalam konsep kebangsaan yang lebih komprehensif, definitif, dan komplementer terhadap tatanan politik dan hukum yang harus segera dibangun. Dengan kata lain, kebangsaan Indonesia – perasaan terikat (*belonging*) dalam kebersamaan yang namanya Indonesia – diperlukan sebagai wadah psikologis (*psychological container*) bagi segala keragaman lokal; lebih dari itu, konsep kebangsaan Indonesia ini harus komplementer terhadap negara Indonesia sebagai wadah politik (*political container*) bagi kepentingan dan aspirasi politik berbagai golongan yang ada. Kebangsaan Indonesia harus bisa menumbuhkan perasaan sebagai suatu subyek kolektif (*collective subject* atau *collective agent*) yang memiliki tujuan dan kehendak bersama (Rousseau, 1881). Dengan demikian, persoalan kebangsaan ini merupakan persoalan krusial yang harus dipikirkan dan dirumuskan dengan baik. Kegagalan merumuskan (dan kemudian memelihara) Indonesia sebagai satu subyek kolektif akan berarti pula kegagalan Indonesia sebagai suatu proyek politik.

METODE

Mengamati kolonialisme Perancis di Afrika Utara, Albert Memi menyimpulkan bahwa “keberadaan penjajah mempersyaratkan dihadapkannya suatu gambaran tertentu tentang yang terjajah. Gambaran ini menjadi alasan atau pembenaran yang tanpanya kehadiran dan perilaku penjajah akan tampak mengejutkan (Memmi, 1957).” Dalam bahasa yang dipopulerkan oleh Jacques Lacan, apa yang digambarkan Memi adalah suatu proses peliyanan (*othering*), suatu cara mendefinisikan dan memantapkan identitas positif diri sendiri melalui stigmatisasi orang lain. Proses peliyanan ini selalu mewarnai subjugasi satu kelompok atas kelompok lainnya, apakah itu dalam bentuk penjajahan, perbudakan, atau yang lain. Hal ini secara eksistensial sangat diperlukan bagi ketentraman psikologis mereka yang terlibat di dalamnya oleh karena subjugasi seseorang atau kelompok atas orang atau kelompok lain secara moral tak mungkin dibenarkan. Inilah alasan mengapa penduduk asli wilayah jajahan sering digambarkan sebagai malas, kekanak-kanakan, culas, jorok, pengecut, tidak prediktabel, tidak bisa dipercaya, tidak jujur, tidak bermoral, *promiscuous*, dan sebagainya (Memmi, 1957). Proses

psikologis seperti inilah barangkali yang memungkinkan Thomas Jefferson, seorang dengan sofistikasi intelektual yang sulit dicari bandingannya, menulis dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat bahwa setiap manusia itu diciptakan setara dengan manusia lainnya dan memiliki hak azasi yang harus dihormati, namun ia sendiri pada saat yang sama juga memiliki sejumlah budak.

Hindia Belanda tak terkecuali dalam hal ini. Simak saja laporan van den Bosch, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa 1830 – 1833, ketika menjustifikasi sistem tanam paksa yang diprakarsainya di mana dia menekankan pentingnya kebijakan yang paternalistik demi kebaikan bangsa Jawa (Panders, 1997). Ia mengatakan:

The intellectual development of the average Javanese does not reach beyond that of our children of twelve to fourteen years, while in general knowledge he is left far behind by them. His chiefs are little more advanced, but in comparison with the European middle classes they have as yet not progressed very far intellectually.

To give to such people institutions suitable for a fully grown society is just absurd as to give children the rights of adults and to expect that they will put them to good use. It was mainly mistakes of this kind that were responsible for the many calamities suffered by the Javanese during the last twenty-five years. (van den Bosch, quoted in Penders, p. 12 – 13).

Sudah barang tentu ideologi yang melatarbelakangi kesimpulan van den Bosch di atas diterjemahkan juga ke dalam sistem dan praktek administrasi kolonial serta merebak ke semua sudut kehidupan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran-gambaran negatif di atas memang sangat memprihatinkan. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah penegasan Memi bahwa “agar sang penjajah menjadi tuan yang sepenuhnya, tidak cukup bila ia pada kenyataannya memang berkuasa, tapi ia juga harus percaya akan legitimasi kekuasaannya. Agar legitimasi tersebut benar-benar menyeluruh, tidak cukup bila yang terjajah menjadi budak; ia harus menerima peran ini. Sebagaimana halnya sang penjajah yang harus menerima perannya, yang terjajahnya harus menerima untuk dijajah.” Dengan demikian, proses peliyanan (*othering*) dari sisi penjajah tadi menemukan pasangannya pada proses internalisasi aturan, norma, dan otoritas penjajah dalam diri bangsa-bangsa terjajah. Aspek penting dari internalisasi, sebagaimana kita pelajari dari Freud, adalah bahwa aturan yang semula datang dari luar kini mengatur dari dalam; aturan yang semula dibarengi dengan kekuatan memaksa kini berlaku tanpa paksaan; aturan yang semula berasal dari orang lain kini datang dari dalam diri sendiri. Ini adalah bentuk subjugasi yang paling efektif dan dapat menjelaskan mengapa aturan, norma, dan otoritas kolonial tadi terus hadir jauh setelah penjajahan itu sendiri berakhir. Oleh karena itu pula kemerdekaan tidak serta merta menghapus struktur subordinasi.

Dalam kaitannya dengan identitas, secara psikologis ini berarti bahwa penduduk pribumi pasti pula meng-internalisasi-kan imaji-imaji negative tentang kelompoknya/bangsanya sebagai bagian dari identitas mereka. Benarkah demikian? Apakah penduduk asli Hindia Belanda menerima dan menginternalisasikan karakterisasi yang diberikan oleh Belanda? Sukarno tampaknya berpikir demikian. Dalam pembelaan dirinya dihadapan pengadilan kriminal Belanda pada tahun 1929 ia mengatakan:

Memang, tidak kurang-kuranglah kita mendengar cacian "*Inlander* seperti kerbau", "*Inlander* goblok", "*Inlander* bodoh, kalau ngga ada kita modar lu", beserta lain-lain "pujian" lagi yang "segar"! Tetapi, walaupun begitu, bukan terutama dalam ucapan-ucapan sombong orang Eropa itu letaknya bahaya yang terbesar buat kami, bukan terutama di dalam ketinggian hati suatu bangsa kulit putih itu letaknya bencana batin dari rakyat kami,--bahaya yang paling besar dan bencana yang paling merusak adalah *sistem* yang tak pedot-pedot, yang tak terhambat-hambat menginjektikan kepada rakyat kami racun kepercayaan "kamu *Inlander* bodoh, kamu modar kalau tidak kita tuntun" itu. Sebab injeksi ini lama-lama "makan"! Berabad-abad kami mendapat cekokan "*Inlander* bodoh", berabad-abad kami diinjeksi rasa kurang karat, turun-temurun kami menerima sistem ini,---ketambahan lagi kami ditetapkan "rendah" dan ditetapkan "kecil" sebagai laporan tentang kemakmuran itu tadi mengatakan, dipadam-padamkan segenap energi kami, sekarang *percayalah* kebanyakan bangsa kami, bahwa kami, sesungguhnya, *memang* adalah bangsa kurang karat yang tak bisa apa-apa! Hilanglah tiap-tiap kepercayaan atas kebisaan sendiri, hilanglah tiap-tiap rasa

kegagahan, hilanglah tiap-tiap rasa percaya diri sendiri dan keperwiraan. Kami, sediakala adalah bangsa yang ikut menjunjung tinggi obor kebudayaan Timur dan kebesaran Timur, yang dulu begitu insaf akan kebisaan diri dan kepandaian diri, kami sekarang menjadi rakyat yang sama sekali kehilangan keinsafan itu. Kami menjadilah rakyat yang mengira, ya, *percaya*, bahwa kami memang adalah rakyat yang "*inferieur*". Kini di mana-mana terdegahlah kesah: "yah, kami memang bodoh, kalau tidak ada bangsa Eropa bagaimana kami bisa hidup (Soekarno, 1930)!"

Dari uraian di atas, dapat kita bayangkan bahwa Soekarno sangat akrab dengan sikap, perilaku, dan sistem pemerintahan dan masyarakat kolonial Belanda yang merendahkan dan menganggap pribumi sebagai anak kecil sebagaimana dianjurkan oleh van den Bosch. Dan jauh sebelum Memi, ia juga sampai pada kesimpulan yang sama. Soekarno tampaknya hendak berkata bahwa gambaran yang begitu negatif mengenai penduduk asli pada awalnya adalah mitos yang diciptakan oleh penjajah untuk memberikan legitimasi dan justifikasi, baik moral maupun politik, atas sistem penjajahan dan perilaku penjajahnya. Namun mitos ini menjadi realitas ketika dilembagakan dalam sistem dan praktek administrasi pemerintahan kolonial sehari-hari. Bagi terkena kutukan van den Bosch, mentalitas bangsa terjajah yang pada mulanya mitos ciptaan penjajah kini telah terkonstruksi menjadi realitas dan tak bisa lain manusia Indonesia ini berpikir, merasa, dan bertindak bagai layaknya bangsa yang terjajah. Apa yang diuraikan Soekarno secara singkat tadi dengan sangat jelas menangkap proses subordinasi di dunia kolonial: peliyanan (*othering*) melalui mitos-mitos pribumi malas, dsb., disusul institutionalisasi mitos-mitos ini dalam sistem administrasi kolonial, dan pada akhirnya internalisasi semua mitos beserta norma-norma dan aturan-aturan kolonial di dalam psike (psyche) penduduk pribumi.

Menciptakan *Homo Indonesiaensis*

Menurut Etienne Balibar, "*a social formation only reproduces itself as a nation to the extent that, through a network of apparatuses and daily practices, the individual is instituted as homo nationalis from cradle to grave, at the same time as he or she is instituted as homo economicus, politicus, religious...*" Kutipan dari Etienne Balibar ini menyiratkan bahwa formasi sosial baru "bangsa Indonesia" akan tumbuh dan kuat bila individu-individu di dalamnya juga terlembagakan sebagai "orang Indonesia" – *homo indonesiaensis* – dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hanya bila individu warga bekas wilayah jajahan ini mengidentifikasi sebagai orang Indonesia, maka "bangsa Indonesia" yang dicanangkan secara formal dalam berbagai deklarasi politik itu dapat direalisasikan. Hal ini bukan upaya yang mudah karena ia berhadapan dengan imaji yang kuat berakar dalam kehidupan kolonial pada saat itu yang seringkali bertolak belakang dengan semangat bangsa merdeka yang hendak dibangun. Oleh karena itu, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh keberhasilan mendekonstruksi imaji lama ini dan menggantikannya dengan yang baru.

Dihadapkan pada "realitas" mentalitas bangsa terjajah di atas, obsesi Soekarno adalah untuk menggantikannya dengan imaji positif bangsa Indonesia, imaji yang diambil dari nilai-nilai dan ciri-ciri asli. Ia meluncurkan istilah *Manusia Indonesia Baru* untuk membedakan manusia Indonesia pasca kemerdekaan dengan manusia Indonesia sebelumnya yang terjajah, minder, dan patah semangat. Secara fisik Manusia Indonesia baru ini adalah manusia yang sehat jasmani, kuat, kokoh dan secara psikologis merupakan pribadi-pribadi yang cerdas, tangguh, ksatria. Soekarno sering menggunakan sosok Gatotkaca sebagai simbol Manusia Indonesia Baru ini: Gatotkaca adalah putra Bima dari ibu Arimbi, seorang keturunan raksasa. Nama kecilnya Tetuko, wajahnya buruk dan mewarisi sifat-sifat raksasa. Setelah diceburkan ke dalam kawah Candradimuka oleh Batara Narada dan diserang dengan segala macam senjata pusaka oleh para dewa, Tetuko muncul dari kawah sebagai seorang ksatria dewasa yang tampan, gagah, dan sering dikatakan memiliki "otot kawat, balung wesi", deskripsi yang sering dipakai Sukarno untuk menggambarkan Manusia Indonesia Baru yang diharapkannya. Suharto melanjutkan upaya ini dengan sedikit perubahan terminologi: *Manusia Indonesia Seutuhnya*.

Dalam konteks ideologi negara, kedua presiden ini mencoba untuk menciptakan suatu kepribadian superordinat dan ideal yang dihayati bersama, hadir dalam benak setiap individu, dan dengan demikian menjadi sumber penting baik bagi identitas nasional maupun personal (Kartodirdjo, 2001). Kepribadian seperti ini diharapkan akan memberikan inspirasi yang kuat dan positif bagi negara kesatuan yang baru keluar dari penjajahan ini. Kepribadian seperti ini juga dianggap perlu untuk mewadahi dan mengekang ikatan-ikatan dan perasaan-perasaan primordial yang dianggap berbahaya.

Politik budaya yang dimulai oleh Soekarno dan diteruskan oleh Orde Baru tadi pada dasarnya

melakukan dua pendekatan untuk membangun identitas nasional yang pada gilirannya diharapkan akan mempererat persatuan Indonesia: disatu sisi mencoba membangun “budaya nasional” yang akan berujung dengan munculnya satu tipe manusia Indonesia yang ideal - manusia Indonesia seutuhnya, dan disisi lain menekan segala perbedaan SARA dan aspek-aspek negatif dari “budaya daerah” atau “budaya tradisional” yang dianggap akan menghambat terciptanya budaya nasional yang unggul tadi. Pendekatan diatas tampak jelas dalam kebijakan mengenai “budaya nasional” dan “budaya daerah” atau “budaya tradisional” yang mewarnai hampir seluruh politik budaya Orde Baru.

Pada intinya, dalam pendekatan ini “budaya nasional” hendak dibangun dari “nilai-nilai budaya daerah” pilihan (tentunya pilihan dalam kacamata ideologi rejim yang memerintah). Nilai-nilai pilihan ini kemudian diintegrasikan sebagai nilai-nilai budaya nasional yang diharapkan akan mendukung munculnya pribadi-pribadi yang jatidirinya terbangun dari amalgam nilai-nilai asli Indonesia yang unggul ini. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa manusia Indonesia orisinal ini akan terbebas dari kepicingan-kepicingan kedaerahan ataupun “primordialisme” dalam bentuk apapun lainnya.

Kondisi Kebangsaan Hari Ini

Berhasilkah usaha tersebut? Siapakah bangsa atau orang Indonesia hari ini? Adakah jejak-jejak homopancasilaensis di sana? Pertanyaan ini – dengan segala macam variannya di seputar identitas nasional, identitas kelompok, hubungan antar kelompok, dan sebagainya – pantas untuk menjadi topik penelitian yang serius.

Pada kesempatan ini, saya hanya ingin menjajagi kekuatan kebangsaan kita melalui beberapa *proxy* obyektif pemenuhan hak-hak warganegara. Rasa kebangsaan, atau identitas nasional, terbangun antara lain dari pengalaman hidup sehari-hari dari setiap warga Negara. Meminjam istilah Michael Billig, inilah “banal nationalism” yang sehari-hari mereproduksi ke Indonesiaan (Billig, 1995). Peringatan 17 Agustus dan peringatan-peringatan yang lain adalah momen-momen reflektif yang penting. Namun lebih penting lagi adalah pengalaman sehari-hari sebagai warga Negara Indonesia; sejauh mana hak-hak sebagai warga Negara terpenuhi; pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman banal (yang positif) sebagai warga negara ini merupakan bagian integral dari proses reproduksi keindonesiaan. Ia secara akumulatif menjadi pupuk bagi tumbuh suburnya rasa kebangsaan atau identitas nasional (Widjanarko, 2008). Pada saat yang sama, keberhasilan Negara memenuhi hak-hak warganegara secara langsung atau tidak langsung akan menentukan bagaimana posisi atau “standing” bangsa tersebut di antara bangsa-bangsa di dunia. Bagaimanakah pengalaman banal warga Negara Indonesia hari ini? Beberapa data di bawah ini dapat memberikan gambaran umum.

Salah satu indikator penting dari kondisi warga suatu negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2021 IPM Indonesia adalah 0.705. Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dunia. Di antara Negara-negara ASEAN Indonesia berada di bawah empat besar ASEAN dengan perbedaan yang lumayan jauh sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

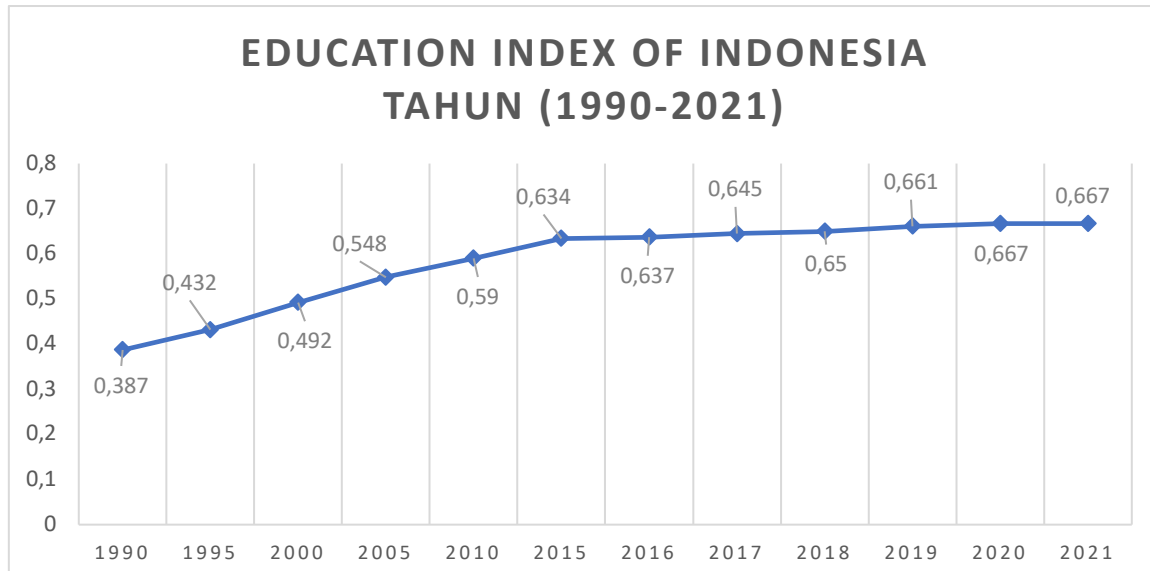
Tabel 1. Peringkat Capaian IPM 2021 Negara-Negara ASEAN

Rank	Country	HDI	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	Gross national income (GNI) per capita	Category
12	Singapore	93,9	82,8	16,5	11,9	90.919	Very High
51	Brunei Darussalam	82,9	74,6	14	9,2	64.490	Very High
62	Malaysia	80,3	74,9	13,3	10,6	26.658	High
66	Thailand	80	78,7	15,9	8,7	17.030	High
114	Indonesia	70,5	67,6	13,7	8,6	11.466	Medium
115	Vietnam	70,3	73,6	13	8,4	7.867	Medium
116	Philippines	69,9	69,3	13,1	9	8.920	Medium
140	Timor-Leste	60,7	67,7	12,6	5,4	4.461	Medium
140	Lao PDR	60,7	68,1	10,1	5,4	7.700	Medium
146	Cambodia	59,3	69,6	11,5	5,1	4.079	Medium
149	Myanmar	58,5	65,7	10,9	6,4	3.851	Medium

Sumber : Human Development Report UNDP, 2021

Dalam konteks kesiapan sumberdaya manusia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), komponen pendidikan dari IPM menarik untuk dicermati lebih jauh. Komponen pendidikan dalam IPM terdiri dari rata-rata lama sekolah (*average years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected Years of schooling*). Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah bangsa Indonesia adalah 8.6 tahun dan harapan lama sekolah 13.7 tahun. Artinya, pada tahun 2020 rata-rata manusia Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas hanya mengenyam pendidikan selama 8.6 tahun saja. Setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

Pada tahun 2020, capaian Index Pendidikan Indonesia adalah 0.667. Capaian ini sama dengan dengan capaian tahun sebelumnya. Bahkan, sesungguhnya capaian Index Pendidikan Indonesia relatif rata (flat) sejak beberapa tahun lalu sebagaimana tampak dari gambar di bawah ini:



Grafik 1. Tren Capaian Indeks Pendidikan Indonesia 1990-2021 (Sumber: Asa Dewantara, diolah dari Laporan IPM BPS Tahun 2010 – 2021)

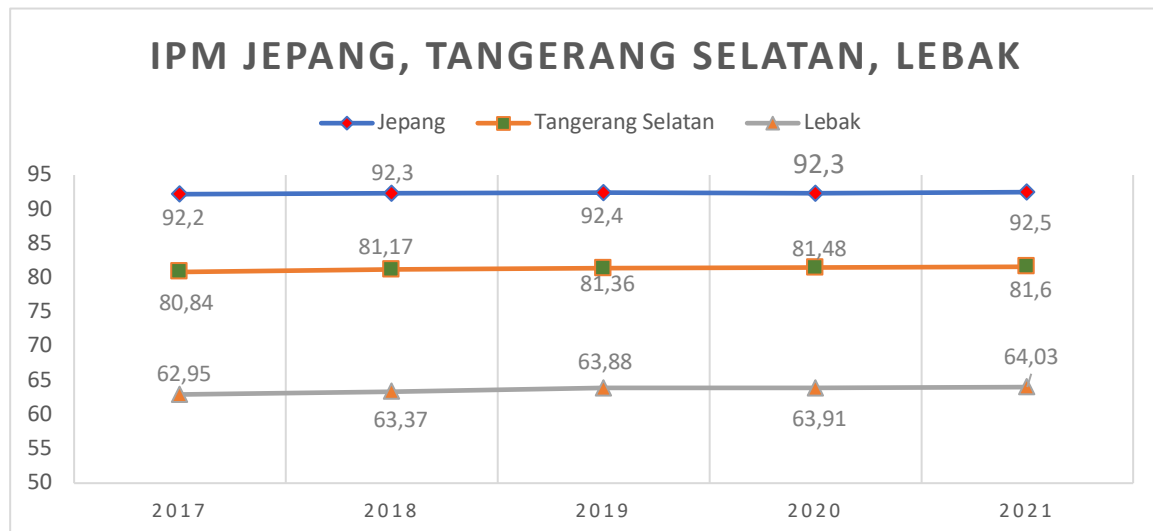
Di balik angka-angka di atas terdapat ketimpangan kualitas hidup manusia Indonesia sehari-hari. Ketimpangan ini termanifestasi dalam setiap tahap perkembangan manusia Indonesia, dari Usia Dini sampai dengan Usia Dewasa. Pada usia dini tantangan perkembangan untuk kelahiran yang aman bagi ibu dan anak, awal yang sehat bagi anak, serta awal yang baik bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak belum dapat dipenuhi dengan merata. Terdapat kesenjangan yang luar biasa besar diantara warganegara miskin dan saudara-saudaranya yang berkecukupan. Hanya sekitar 40,23% anak usia 3-6 tahun dari kelompok termiskin ini (sekitar 7,6 juta anak) yang terdaftar di satuan PAUD. 57,5% anak-anak ini tinggal di pedesaan (Dewantara, 2023).

Pada usia sekolah (7-18 tahun) anak-anak Indonesia dari kelompok miskin banyak yang tak mampu untuk bersekolah. Biaya pendidikan masih terlalu mahal bagi orang tua mereka. Bagi mereka yang bersekolah, tingkat kemampuan mereka berada jauh di bawah anak-anak seusia mereka dari keluarga yang lebih mampu. Sekitar 39% anak-anak dari kelompok 10% termiskin tidak bersekolah lagi.

Kelompok usia 15–24 tahun seharusnya berpartisipasi aktif dalam pendidikan, pelatihan, dan lapangan kerja. Namun 24,9% anak-anak dari keluarga 10% termiskin di Indonesia usia 15-24 tahun dianggap tidak aktif ('idle'). Meskipun di tahun 2021, 61% anak-anak dari keluarga termiskin ini dapat lulus SMA, namun yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar 3,02%.

Ketimpangan-ketimpangan di atas dapat pula kita mengerti sebagai ketimpangan antar wilayah (wilayah Indonesia bagian barat Vs. Indonesia bagian timur); antar provinsi, serta antar kabupaten di dalam provinsi. Misalnya saja, Pada tahun 2021 DKI Jakarta memiliki capaian IPM 81.11, sementara Provinsi Banten tetangganya secara umum capaiannya hanya 72.72. Kesenjangan sekitar 8.39 poin antara ibukota dan provinsi tetangganya ini merupakan indikasi awal ketimpangan di Indonesia. Bila kita masuk ke Provinsi Banten dan membandingkan capaian IPM antar kota dan kabupatennya, maka

akan kita temui kesenjangan yang lebih besar lagi. Kota Tangerang Selatan memiliki capaian IPM 81.6, sedangkan IPM Kabupaten Lebak hanyalah 64.03. Perbedaan lebih dari 17.57 poin. Bila dilihat dari capaian IPM ini, sudah sejak lama kualitas hidup anak-anak Kota Tangerang Selatan tampaknya lebih mirip dengan kualitas hidup anak-anak Jepang secara umum sebagaimana tampak dari tren capaian di bawah ini:



Grafik 2. Tren Capaian IPM 2017-2021 (Diolah dari Human Development Report UNDP, 2021)

Kita dapat teruskan perbandingan untuk seluruh provinsi di Indonesia dan turun tidak hanya antar kabupaten, tapi bahkan juga antar kecamatan di dalam kota dan kabupaten. Hal ini menunjukkan kesenjangan kualitas hidup yang merata; di Indonesia hari ini warganegara hidup dengan kualitas yang berbeda, tergantung di mana mereka tinggal.

Ketimpangan-ketimpangan yang mencerminkan perbedaan kualitas hidup antar kelompok warganegara dapat dengan mudah menjadi sumber ketidakpuasan terhadap Negara. Terlebih lagi, bila ketimpangan-ketimpangan tersebut dipersepsi sebagai akibat dari ketidakpedulian Negara untuk mengurus kelompok warganegara tertentu. Ketidakpuasan yang pada mulanya merupakan ketidakpuasan terhadap *penyelenggaraan* Negara (civic discontent), dengan sangat mudah bergulir menjadi ketidakpuasan terhadap Negara. Ekspresi ketidakpuasan inipun dengan sangat mudah bergulir dari ekspresi yang damai menjadi ekspresi-ekspresi yang penuh kekerasan. Di daerah-daerah perbatasan dengan Negara lain, warganegara Indonesia membandingkan kualitas hidup mereka dengan tetangganya di seberang. Wilayah perbatasan ini sangat unik karena di sana batas fisik geografis sebagai batas-batas eksternal (external boundary) berimpit dekat dengan rasa kebangsaan sebagai batas-batas psikologis (internal boundary) dari kebangsaan kita. Hampir secara harfiah, kebangsaan Indonesia dihadapkan pada plebisit setiap hari dengan dibandingkan dengan apa yang ada dan terjadi di Negri sebelah.

Mencari Politik Budaya dan Kewarganegaraan yang Pas

Dalam hiruk-pikuk kebebasan 25 tahun pasca Suharto, dapat dilihat semakin meluas dan menguatnya ekspresi-ekspresi identitas kolektif yang bukan identitas nasional atau, dalam bahasa Orde Baru, berbau SARA. Warga negara, secara individu maupun kelompok, tidak lagi merasa perlu menekan atau menyembunyikan perbedaan masing-masing dalam rangka untuk fit didalam format identitas tertentu, yang dominan atau yang disodorkan oleh pihak lain, khususnya pemerintah. Identitas-identitas regional dan primordial yang dulu tidak mendapat kesempatan untuk diekspresikan kini mengemuka. Gaung dari hal ini terdengar dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan tatakelola pemerintahan maupun masalah-masalah keseharian yang langsung berkaitan dengan ekspresi budaya dan identitas (misalnya bermunculannya simbol-simbol etnik dan kedaerahan) (Idris & Gisnar 2021). Tak pelak lagi, keadaan diatas menimbulkan kecemasan di berbagai kalangan. Kecenderungan ini dianggap melemahkan identitas nasional dan, oleh karenanya, berbahaya bagi kelangsungan kebangsaan itu sendiri. Selanjutnya, pudarnya identitas nasional akan berlanjut dengan separatisme.

Selain itu, dalam konteks yang lebih pragmatik, kecenderungan ini dilihat sebagai bermain dengan api SARA yang dalam kobaran besarnya bisa meledak menjadi konflik dengan kekerasan yang berkepanjangan dan sulit dipadamkan. Oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas, ekspresi identitas primordial dan regional dianggap sebagai suatu yang rawan.

Tidak jarang kekhawatiran diatas mendorong munculnya wacana, bahkan upaya, untuk kembali menekan ekspresi-ekspresi “identitas lokal”, sembari menekankan pentingnya identitas nasional (demi efisiensi tempat dalam tulisan ini identitas lokal dimaksudkan untuk merujuk identitas berdasarkan SARA maupun wilayah). Wacana dan upaya semacam ini akan membetot kita kembali kepada pendekatan Orde Baru yang telah terbukti gagal.

Upaya membangun manusia Indonesia yang orisinal berdasarkan nilai-nilai budaya asli yang unggul dari berbagai daerah seperti dibayangkan Orde Baru ternyata merupakan suatu kemustahilan. Barangkali ada, bahkan banyak, nilai-nilai yang sama yang dapat kita temui dalam berbagai tradisi di Indonesia. Namun, masing-masing nilai ini bila dicabut dari keseluruhan bangunan tradisinya akan kehilangan makna. Demikian pula membangun “manusia Indonesia” dari potongan-potongan nilai-nilai unggul dari sana-sini barangkali juga tidak akan melahirkan manusia yang utuh. Manusia Indonesia ideal ini adalah manusia Indonesia yang jauh dari pengalaman sehari-hari manusia Indonesia yang real; ia bebas dari ritual-ritual kolektivitas yang membuat hidup bermakna. Ia hampa dan pada akhirnya ia memang hanya abstraksi saja. Setiap orang akan merasa lebih “krasan” dan nyaman untuk mengekspresikan diri dalam idiom-idiom budaya yang dekat atau intim dalam hidupnya. Hal ini hanya bisa disediakan oleh budaya lokal.

Oleh karena tekanannya yang sangat kuat pada pentingnya budaya nasional, konsep “budaya tradisional” seringkali hanya menyisakan “seni budaya” atau “kesenian daerah” dan itupun seringkali hanya mencakupi tari-tarian, pakaian tradisional, kerajinan tangan, dan kadang arsitektur. Hal ini tak bisa dielakkan karena hal-hal inilah yang relatif mudah diangkat, tidak kontroversial, dan aman dibanding dengan bicara soal nilai-nilai dan norma-norma yang tak bisa dihindarkan akan ada yang tidak kompatibel, bahkan bertentangan, satu dengan yang lain. Sementara itu, hal-hal yang merupakan aspek inti dari suatu budaya dan sangat penting untuk mempertahankan identitas kelompok yang hidup dengan budaya tersebut (seperti sistem hukum, agama, praktek-praktek ekonomi, organisasi sosial) sering diabaikan.

Selain itu segala upaya memilih-milih nilai budaya daerah mana yang akan dipromosikan dan mana yang bisa diabaikan atau bahkan harus ditekan akan terlihat sebagai pemaksaan kehendak, bahkan penindasan, oleh negara terhadap daerah atau kelompok tertentu. Pada tataran budaya ini menimbulkan kepengapan yang mencekik kreativitas. Lebih buruk lagi, bila negara diasosiasikan dengan kelompok etnik yang dominan atau mayoritas, maka upaya tadi dapat dipersepsi sebagai penindasan kelompok dominan terhadap yang kurang dominan.

Kedua pendekatan diatas merupakan dua sisi dari kesalahan yang sama dalam memahami formasi identitas nasional dan identitas-identitas lokal, serta hubungan antara berbagai macam identitas ini dalam suatu ruang politik yang bernama negara Indonesia: yaitu menempatkan identitas nasional dan identitas lokal dalam satu kontinum. Dengan demikian, kuatnya identitas lokal berarti lemahnya identitas nasional dan sebaliknya. Hubungan antara keduanya dimengerti sebagai suatu *zero sum game* dimana kekuatan yang satu harus dibayar dengan kelemahan yang lain. Dalam format ini ke-bhinekaan dan ke-tunggal-an tak bisa dipertemukan. Karena yang dianggap lebih penting adalah identitas nasional, maka keragaman tidak dirayakan, bahkan harus ditekan. Tak pelak lagi, ideologi nasional dan kebijakan yang dibangun diatas pemahaman yang demikian merupakan ideologi dan kebijakan yang selalu curiga (paranoid), bahkan tidak toleran, terhadap keragaman daerah. Dan dari ideologi dan kebijakan seperti di atas yang muncul bukannya persatuan Indonesia melainkan, meminjam istilah Bung Hatta, *persatean* Indonesia.

Tulisan ini tidak hendak berargumen bahwa identitas nasional itu tidak perlu. Justru sebaliknya. Identitas nasional yang kuat diperlukan demi kesehatan demokrasi. Tanpa identitas nasional yang kuat perasaan sebagai satu komunitas (*sense of community*) sulit dibangun. Tanpa adanya perasaan sebagai satu komunitas maka kita tidak bisa berharap untuk membangun *collective agency* yang diperlukan untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Pendeknya tanpa identitas nasional yang kuat tidak ada komunitas nasional, dan tanpa komunitas nasional tidak ada demokrasi yang sepenuhnya.

Masalahnya, upaya membangun identitas nasional model Orde Baru sudah terbukti tidak

produktif. Diperlukan pemahaman yang lebih arif mengenai aspek dan dinamika psikologis dari konstruksi identitas nasional dan kebijakan yang lebih kreatif untuk mengurus kemajemukan identitas kolektif di Indonesia beserta politik yang terkait dengannya sehingga rasa sebagai komunitas nasional dapat dibangun tanpa bercuriga dan tanpa mengurangi rekognisi terhadap keragaman daerah. Diperlukan strategi kebudayaan yang pas untuk itu. Berikut ini adalah pikiran awal untuk membangun strategi kebudayaan tersebut.

1. Indonesia adalah civic state

Indonesia pertama-tama harus dipahami sebagai suatu *civic state*, bukan *nation state* apalagi *ethnic nation* (mungkin pula tak dapat di sebut sebagai *nation state*). Di dalam *ethnic nation* atau *nation state* identitas nasional dibangun di atas dasar persamaan etnik atau latar belakang budaya lainnya (seperti misalnya agama dan bahasa). Dalam suatu *civic nation* yang menjadi perekat identitas nasional pertama-tama dan yang terutama adalah *civic identity*, yaitu identitas sebagai warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri dan meraih kesejahteraan.

Identitas nasional ini tidak akan pernah menggantikan afiliasi-afiliasi kedaerahan, kesukuan, agama dan identitas lokal lain-lainnya, melainkan ada bersama identitas-identitas lokal ini. Identitas lokal bukanlah identitas yang sekunder, melainkan komplementer terhadap identitas nasional. Identitas lokal sangat penting dalam kehidupan setiap warga negara sebagai ekspresi kultural yang paling dekat, hangat, dan bermakna.

2. Hubungan antara identitas nasional dan identitas lokal bukanlah hubungan yang zero sum

Identitas nasional dan identitas lokal adalah dua macam identitas kolektif yang berbeda, yang memiliki prinsip dan dinamika yang berbeda, dan oleh karenanya tidak perlu bertentangan; kedua identitas ini tidak berada pada satu kontinum sehingga hubungan antara keduanya juga bukan hubungan yang *zero sum* di mana kuatnya yang satu harus dibayar oleh lemahnya yang lain.

Konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik dari sosiolog Emile Durkheim dapat kita pinjam secara longgar untuk memahami kedua macam identitas ini. Identitas nasional (dan budaya nasional pada umumnya) adalah salah satu bentuk solidaritas organik, yaitu solidaritas yang terbangun dari rasa saling ketergantungan). Sedangkan identitas lokal (dan budaya lokal pada umumnya) merupakan satu bentuk solidaritas mekanik, yaitu solidaritas yang terbangun dari rasa persamaan. Jadi, pada tataran nasional kita dapat memiliki suatu kesadaran kolektif yang basis utamanya adalah saling ketergantungan dalam suatu entitas politik yang bernama negara untuk mencapai cita-cita masing-masing (kemerdekaan, kesejahteraan, dan mimpi-mimpi apapun lainnya). Sementara itu, pada tataran lokal kita memiliki kesadaran kolektif yang basis utamanya adalah homogenitas dan identifikasi yang tercermin dalam persamaan tempat asal, agama, bahasa, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Kata “utamanya” dalam batasan ini dimaksudkan untuk tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kedua tataran (nasional dan lokal) kedua bentuk solidaritas ini ada.

Dalam konsepsi yang demikian dapat dibayangkan kemungkinan untuk sekaligus menjadi orang yang totok Jawa, Batak, Ambon, Cina, Islam, Kristen, Hindu, Budha dan sebagainya sekaligus menjadi orang Indonesia yang bangga karena imajinasi kolektif mengenai Indonesia atau ke-Indonesia-an bukanlah keseragaman karakteristik-karakteristik budaya, apalagi keseragaman kepribadian, melainkan persamaan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi. Dengan konsepsi seperti ini, suatu Indonesia dengan identitas nasional dan identitas lokal yang kuat bukan hanya mungkin, tapi justru suatu yang ideal dan harus diusahakan.

3. Identitas nasional Indonesia yang kuat hanya akan terbangun melalui praktek kewarganegaraan yang penuh

Kewarganegaraan yang penuh disini merujuk pada konsep dan praktek kewarganegaraan yang tidak terbatas pada status legal saja, tapi juga menjamin kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan warganegara. Kewarganegaraan yang demikian tidak saja menjadi sumber dari hak-hak warganegara, tapi juga sumber harga diri. Hanya bila warga negara merasakan kewarganegaraannya memberikan harga diri dan menjamin hak-haknya sebagai individu ataupun anggota kelompok tertentu maka mereka akan menyambut dan merayakan identitas sebagai warga negara tersebut, dan dengan demikian merayakan pula identitas nasionalnya. Kewarganegaraan seperti ini tidak cukup dicakup oleh status legal saja. Dengan perspektif ini bisa dipertanyakan

dalam kasus Indonesia seberapa jauh kewarganegaraan sudah menjamin kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan.

Kewarganegaraan yang penuh juga harus mencakupi aspek-aspek politik dan sosial. Kewarganegaraan belum bisa dikatakan penuh bila salah satu aspek belum terjamin; status sebagai warganegara saja tidak cukup bila hak-hak politik tidak terpenuhi. Demikian pula, terpenuhinya hak-hak politik saja tidak cukup bila kesejahteraan warganegara tidak bisa direalisasikan. Negara sebagai wadah politik dan identitas nasional sebagai wadah psikologis akan menjadi kuat dengan adanya praktek kewarganegaraan yang penuh dan, sebaliknya, keduanya akan menjadi lemah dengan praktek kewarganegaraan yang parsial.

4. Politik dan praktek kewarganegaraan yang penuh harus menjawab problema kesenjangan ekonomi dan marjinalisasi kultural

Dalam setiap entitas politik dan sosial tak bisa dihindarkan adanya kesenjangan ekonomi, dan kadang, marjinalisasi kultural. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah bagian sangat penting dari politik kewarganegaraan. Warganegara harus melihat dan merasakan bahwa negara secara serius mencoba mengatasi ketidakadilan yang berakar dalam struktur ekonomi, termasuk di dalamnya eksploitasi, marjinalisasi, dan deprivasi ekonomi.

Demikian pula halnya dengan masalah marjinalisasi kultural; warganegara harus melihat dan merasakan adanya upaya serius dari negara untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan kultural yang berakar pada pola-pola representasi, interpretasi, komunikasi, dan dominasi kultural.

5. Konsep kewarganegaraan yang penuh juga menyaratkan warganegara yang tahu dan memiliki adab bernegara

Banyak pendukung demokrasi liberal yakin bahwa dengan sistem yang baik (baca: demokrasi) negara dapat berfungsi terlepas apakah warganegara memiliki adab bernegara (*civic virtues*) atau tidak; perangkat kelembagaan dan prosedur seperti pemisahan kekuasaan dan berbagai mekanisme *check and balance* akan memastikan warganegara atau kelompok yang satu tidak akan menindas warganegara atau kelompok yang lain. Pengalaman negara-negara dengan sistem demokrasi yang sudah mapan menunjukkan bahwa keyakinan ini terlalu optimistik. Michael Sandel menunjukkan bahwa demokrasi di Amerika Serikat mengalami kemerosotan yang tajam karena mudahnya adab bernegara (*civic virtues*) dari warganegara. Demokrasi juga memerlukan warganegara yang tahu tanggung jawab pribadinya, yang peduli dengan lingkungannya, yang antusias berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik negaranya, dan sebagainya. Politik dan kebijakan kewarganegaraan harus pula memikirkan bagaimana melahirkan warganegara seperti itu.

6. Reproduksi identitas nasional terjadi melalui hal-hal yang rutin dan banal

Identitas sebagai warga negara Indonesia (dan demikian juga identitas nasional Indonesia) tidak begitu saja muncul bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan. Sebagaimana dikatakan Etienne Balibar bahwa "*formasi sosial hanya mereproduksi diri sebagai suatu bangsa sejauh, melalui jejaring aparatus dan praktik-praktik sehari-hari, warga dilembagakan sebagai homonasionalis dari ayunan sampai liang lihat, sebagaimana pula pada saat yang sama dia dilembagakan sebagai homo economicus, politikus, religiosus...*" (Balibar, 1996). Hal ini disadari benar oleh para pendiri bangsa, sehingga dengan cukup sistematis mereka mengupayakan reproduksi ini. Namun fokus dari upaya ini sangat dipengaruhi oleh konsepsi kebangsaan sebagai *ethnic nation* atau *nation state* sehingga yang menjadi tujuan adalah mencari dan mempromosikan kesamaan-kesamaan nilai-nilai atau karakter manusia Indonesia dan melupakan Indonesia sebagai suatu *civic state/nation*. Upaya ini terbukti kontraproduktif karena hasilnya adalah karikaturisasi baik identitas lokal maupun identitas nasional itu sendiri. Reproduksi identitas nasional terjadi melalui peristiwa-peristiwa rutin dan *banal* sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya yang mencerminkan pemenuhan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi, seperti kemudahan sekolah anak, kemudahan dan kelancaran transportasi ke dan dari tempat kerja, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan sebagainya.

7. Tantangan dalam mengurus partikularisme yang begitu beragam adalah menciptakan ruang-ruang identitas bersama

Dalam mengurus Indonesia sebagai suatu *civic state/civic nation* harus dihindarkan keterlibatan negara secara langsung untuk mereproduksi budaya etnik tertentu atau memilih-milih budaya

daerah unggulan untuk dipromosikan sebagai kandidat budaya bangsa. Peranan negara adalah menciptakan dan mengurus ruang-ruang identitas bersama, bukan menciptakan identitas itu sendiri, karena identitas tidak bisa dipaksakan. Dalam kerangka politik, hukum, dan ekonomi yang jelas dan adil, identitas nasional yang kuat akan dapat tercipta. Identitas ini bukan identitas yang pasif karena ia akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan realitas politik, hukum dan ekonomi negara serta dinamika interaksi antar kelompok itu sendiri. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia bukanlah sesuatu yang terpaku dan beku dalam dimensi waktu, melainkan sesuatu yang cair, terus berkembang, berubah. Tak hanya belum sudah sebagaimana dibayangkan Rivai Apin pada awal kemerdekaan, Indonesia adalah dunia yang tak pernah sudah.

SIMPULAN

Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan adalah temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau tujuan penelitian. [Times New Roman, 11, normal].

Gambaran agak suram mengenai kondisi manusia Indonesia di atas bukan alasan untuk menjadi pesimis. Indonesia hari ini memang memprihatinkan, tetapi kita masih punya lebih banyak alasan untuk optimis. Pesimisme jelas tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan kita. Namun, optimisme saja juga tidak cukup. Diperlukan aktivisme yang bergairah di segala bidang untuk mengurus, merawat, dan menumbuhkan Indonesia dan kebangsaan Indonesia. Insight-insight mengenai proses psikologis dan kultural sangat diperlukan untuk mencari, merumuskan, dan mengimplementasikan strategi kebudayaan yang saya uraikan di atas.

Secara lebih spesifik, insight-insight sosio-psikologis diperlukan untuk mengurus kebutuhan warganegara Indonesia pada setiap tahapan kehidupannya, sejak konsepsi hingga lanjut usia; sejak bayi lahir sehat hingga manula yang tangguh. Demikian pula insight-insight tersebut dibutuhkan dalam mengurus ruang-ruang publik di mana manusia Indonesia yang begitu beragam ini – secara personal maupun kelompok – berinteraksi dan menegosiasikan identitasnya.

REFERENSI

- Alatas, Syed Hussein. (1977). *The Myth of the Lazy Native*. London: F. Cass.
- Anderson, Ben. (1991). *The Imagined Community*. New York: Verso.
- Billig, M. (1995). Istilah “banal nationalism” yang digunakan Billig merujuk pada representasi sehari-hari dari “the nation” dalam simbol-simbol yang membangun “a shared sense of national belonging”. Saya meminjam istilah ini untuk merujuk juga pengalaman konkret sehari-hari dari warga negara terkait dengan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga suatu bangsa.
- De Tocqueville, Alexis. (2003). *Democracy in America*. Penguin Classic.
- Dewantara, Rilis Asa. (2023). *Menyingkap Perjalanan Pendidikan Anak Keluarga Miskin di Indonesia*.
- Hidayat, K., & Widjanarko, P. (Eds.). (2008). *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Tidar Heritage Foundation dan Penerbit Mizan.
- Idris, I.K., & Gisnar, A.M. (2021). TikTok: Ruang baru ekspresi dan negosiasi identitas lokal Gen Z Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (2001). *Indonesian Historiography*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Memmi, Albert. (1965). *The Colonizer and the Colonized* (terj. dari edisi Prancis 1957). Boston: Beacon Press.
- Nandy, Ashis. (1983). *The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism*. New York: Oxford University Press.
- Penders. (1997). (Judul buku tidak diberikan).
- Renan, E. (1990). What is a nation? Dalam H. Bhabha (Ed.), *Nation and Narration*. London: Routledge. (Edisi asli diterbitkan tahun 1882)
- Rousseau. (1881). *The Social Contract*. (Informasi lebih lanjut mengenai edisi dan penerbit diperlukan)
- Sandel, Michael. (1998). *Democracy's Discontent: America in Search of a Public Philosophy*. Harvard University Press.
- Soekarno. (1983). *Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan*

- Kolonial Bandung* (Edisi asli diterbitkan tahun 1930). Jakarta: Yayasan Pendidikan Sukarno dan Inti Idayu Press.
- Stoler, Ann. (Tanpa Tahun). Children on the Imperial Divide: Sentiments and Citizenship in Colonial Southeast Asia. *CSST Working Paper* #78.
- Todorov, Tzvetan. (1992). *The Conquest of America: The Question of the Other*. New York: Harper and Row.
- Widjanarko, P. (2008). Indonesia: Sebuah Bangsa Yang Tak Pernah Sudah? Dalam Hidayat, K., & Widjanarko, P. (Eds.). *Reinventing Indonesia: Menemukan Kembali Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Tidar Heritage Foundation dan Penerbit Mizan.